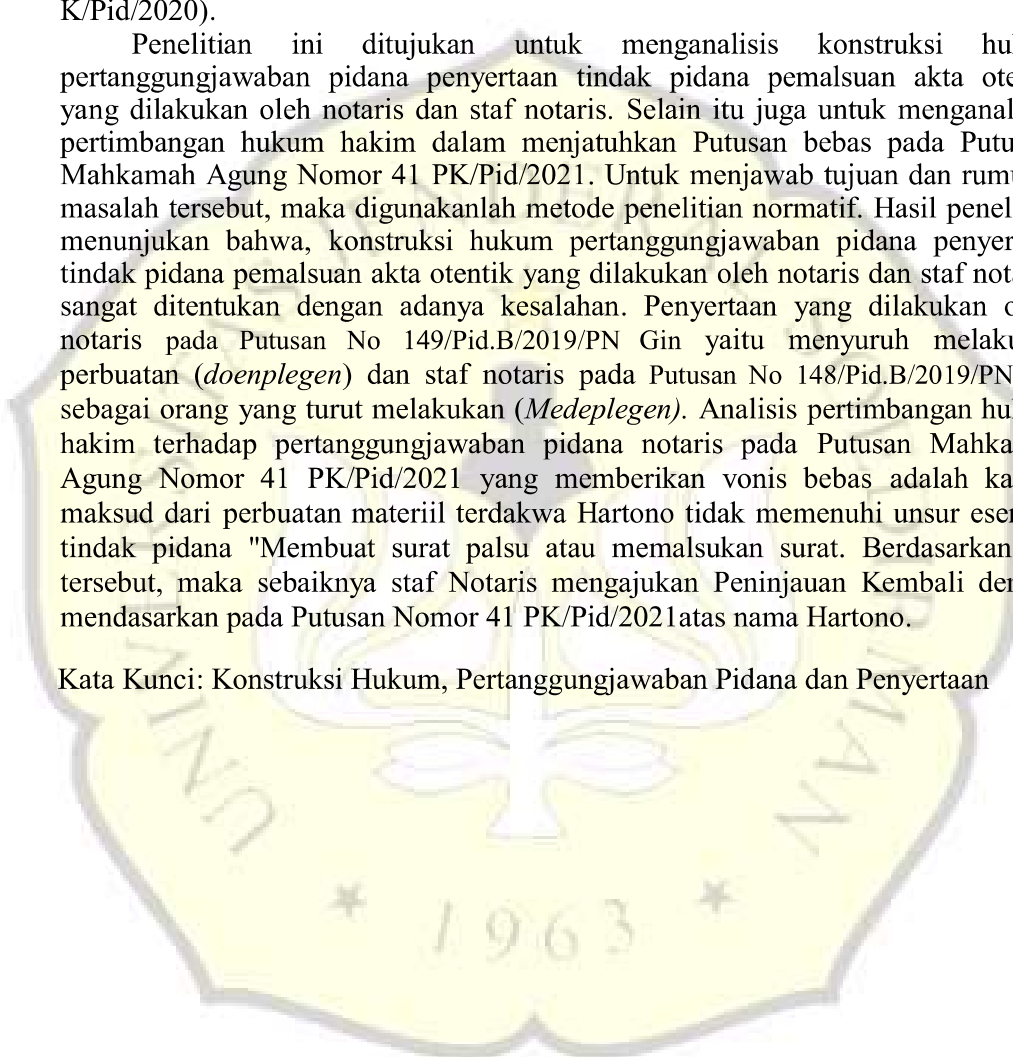


RINGKASAN

NUNIK HANDAYANI, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris dan Staf Notaris (Tinjauan Normatif Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/Pid/2020).

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana penyertaan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan staf notaris. Selain itu juga untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan bebas pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021. Untuk menjawab tujuan dan rumusan masalah tersebut, maka digunakanlah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana penyertaan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan staf notaris sangat ditentukan dengan adanya kesalahan. Penyertaan yang dilakukan oleh notaris pada Putusan No 149/Pid.B/2019/PN Gin yaitu menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*) dan staf notaris pada Putusan No 148/Pid.B/2019/PN Gin sebagai orang yang turut melakukan (*Medeplegen*). Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 yang memberikan vonis bebas adalah karena maksud dari perbuatan materiil terdakwa Hartono tidak memenuhi unsur esensial tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya staf Notaris mengajukan Peninjauan Kembali dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021 atas nama Hartono.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Pertanggungjawaban Pidana dan Penyertaan



SUMMARY

NUNIK HANDAYANI, Notary Masters Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, Criminal Responsibility for Participation in the Crime of Forgery of Authentic Deeds Committed by Notaries and Notary Staff (Normative Review of Supreme Court Decision Number 41 PK/Pid/2021 and Supreme Court Decision Number 134 K/Pid/2020).

This research is aimed at analyzing the legal construction of criminal liability as well as the criminal act of forging authentic deeds committed by notaries and notary staff. Apart from that, it is also to analyze the judge's legal considerations in imposing an acquittal on Supreme Court Decision Number 41 PK/Pid/2021. To answer the objectives and formulation of the problem, normative research methods are used. The results of the study show that the legal construction of criminal responsibility, including the crime of forging authentic deeds carried out by notaries and notary staff, is determined by the presence of errors. Participation made by the notary in Decision No. 149/Pid.B/2019/PN Gin, namely ordering the deed (doenplegen), and the notary staff in Decision No. 148/Pid.B/2019/PN Gin as the person who took part (Medeplegen). Analysis of the judge's legal considerations for the notary's criminal responsibility in Supreme Court Decision Number 41 PK/Pid/2021, which gave an acquittal, was because the intention of the material actions of the defendant Hartono did not fulfill the essential elements of the crime of making fake letters or falsifying letters. Based on this, it is best if the notary staff submits a judicial review based on Decision Number 41 PK/Pid/2021 on behalf of Hartono.

Keywords: Legal Construction, Criminal Liability and Inclusion

